

Nama: Yosi Tirani Putri

NPM: 2215011083

Kelas: D

Analisis Jurnal

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki banyak pengertian dan istilah,. Namun, secara umum Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan karakter bangsa yang sangat penting diterapkan terutama di era modern (iptek dan globalisasi) saat ini demi mempersiapkan warga negara Indonesia yang cerdas dan menjadi bagian dari warga dunia (*Global Society*).

Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter (*Character Building*) bangsa Indonesia antara lain:

- a. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab.
- b. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap berkomitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa.
- c. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.

Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang awam (belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti masyarakat) tentang demokrasi. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal yaitu;

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), yaitu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui

mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum dan menjalankan program-programnya sebagai amanat yang diberikan rakyat.

2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), yaitu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi atau golongan.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), yaitu kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Tak hanya tabu akan demokrasi, Indonesia juga tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia sampai terkukuhkan dalam UU di Indonesia. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pertamakalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan.

Setelahnya muncullah istilah masyarakat madani, yaitu sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Adapun ciri-cirinya yang khas yaitu multicultural, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai.

Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani yaitu wilayah public yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan (pluralism), dan keadilan sosial (social justice).

Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi bibit untuk prinsip demokrasi berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan yang sumbernya Pancasila dalam membentuk karakter bangsa.

